

II. ANALISIS PENERAPAN ISAK NO. 35 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NONLABA PADA YAYASAN SRI SATHYA SAI BALI

2.1 Interpretasi ISAK NO. 35

Interpretasi ISAK NO. 35 membahas tentang bagaimana entitas nonlaba membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Berikut ini merupakan isi dari interpretasi ISAK NO. 35:

- a. Penyajian laporan keuangan disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1.
- b. Entitas nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan atau tidak adanya pembatasan oleh pemberi sumber daya.
- c. Entitas juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya, penyesuaian atas judul laporan keuangan tidak dibatasi.
- d. Entitas tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan.

2.2 Entitas Nonlaba

Organisasi yang memiliki tujuan utama menyokong masalah atau subjek agar menarik orang demi tujuan yang bukan komersial, dengan tidak menghiraukan pada hal yang bersifat mencari laba disebut dengan organisasi non-profit atau organisasi nonlaba. (Komang, 2008)

Menurut (Sri Sapto, 2009) “Organisasi nonlaba dapat didefinisikan secara hukum sebagai organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset atau pendapatan mereka untuk kepentingan dan kesejahteraan karyawan atau pemimpin mereka. Tetapi meskipun ada pembatasan, ada beberapa konsesi. Yang pertama adalah organisasi nonlaba yang tidak dilarang memberi kompensasi kepada karyawan mereka sebagai imbalan atas prestasi mereka. Yang kedua adalah organisasi nonlaba tidak dilarang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi sekali lagi tidak untuk distribusi tetapi untuk pembiayaan proyek lain. Keuntungan lainnya adalah organisasi nonlaba tidak dikenakan pajak”.

“Lembaga nonlaba memperoleh sumber dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan pengembalian dana atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang disediakan” (IAI, 2011: 45.1). “Organisasi nonlaba termasuk gereja, sekolah umum, amal, rumah sakit umum dan klinik, organisasi politik, dukungan masyarakat dalam hukum, organisasi layanan sukarela, serikat pekerja, asosiasi profesional, lembaga penelitian, museum, dan beberapa pejabat pemerintah” (Setiawan, 2007).

2.3 Karakteristik Entitas Nonlaba

Di dalam PSAK No. 45 (Revisi 2011) (IAI, 2011: 45.2-45.3) terdapat penjelasan mengenai karakteristik entitas nonlaba yaitu sebagai berikut:

- Pemberi sumber daya yang memberikan sumber daya kepada entitas nonlaba tidak mengharapkan pembayaran kembali atau mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan oleh pemberi sumber daya.
- Menumpuk laba bukan menjadi tujuan dalam menghasilkan barang atau jasa, dan jika laba dihasilkan oleh entitas nonlaba maka, para pendiri maupun pemilik entitas tidak mendapatkan laba tersebut atau jumlah laba tersebut tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik.
- Kepemilikan yang pada umumnya ada di entitas bisnis adalah tidak ada di entitas nonlaba. Dengan kata lain kepemilikan entitas nonlaba tidak dapat dialihkan, atau untuk dijual kembali.

2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan dari suatu organisasi selama satu periode yang mencerminkan kinerja organisasi. Laporan keuangan ini dianggap sangat penting untuk dibuat karena mereka dapat menjelaskan kinerja organisasi selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang terkumpul diharap bisa menyajikan informasi relevan pada penggunaannya. “Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang perlu mengetahui tentang keadaan perusahaan dalam hal jumlah unit uang” (Fahmi, 2014: 26).

IAI (2011: 45.4) menyatakan bahwa “tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi pentingnya menyediakan sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran, anggota, kreditor dan pihak lain yang menyediakan sumber daya untuk entitas nonlaba”.

2.5 Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Organisasi nonlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nonlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian *not-for-profit* juga harus diartikan sebagai *not-for-loss*. Oleh karena itu, organisasi nonlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nonlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nonlaba tersebut.

Dalam hal kepemilikan, kepemilikan dalam organisasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali sebagaimana pada organisasi bisnis. Selain itu, kedua jenis organisasi tersebut berbeda dalam hal cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nonlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidak mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.

Walaupun tidak meminta adanya pengembalian, namun para donatur sebagai salah satu *stakeholder* utama organisasi nonlaba tentunya mengharapkan

adanya pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para donatur ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk memberi manfaat bagi kepentingan publik.

Untuk itu, organisasi nonlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nonlaba yang lingkupnya masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nonlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nonlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum.

Laporan keuangan hasil dari proses akuntansi entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK NO. 35 diantaranya:

- a. Laporan Posisi Keuangan (neraca) pada akhir periode laporan
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif
- c. Laporan Perubahan Aset Neto
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.6 Jenis Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba

ISAK NO. 35 merupakan standar akuntansi keuangan yang dikategorikan baru, standar ini disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Pada saat mengesahkan ISAK NO. 35. Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga menerbitkan PPSAK 13 yang berisi pencabutan PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nonlaba. Dalam ISAK NO. 35 terdapat laporan penghasilan komprehensif, klasifikasi aset neto yang digunakan dalam ISAK NO. 35 terbagi menjadi aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan sebagai berikut.

2.6.1 Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset bersih entitas dalam periode tertentu. Laporan ini dapat digunakan pengguna laporan keuangan untuk menilai seberapa besar nilai aset dan nilai liabilitas suatu entitas nonlaba. Dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba terdapat:

1. Aset

Merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis serta mampu menunjang kegiatan entitas, dapat dihitung dengan nominal ketika memperoleh dan dihitung nilai wajarnya sesuai kondisi objektif. Pada umumnya aset sendiri terdiri dari:

- a. Kas dan setara kas,
- b. Piutang,
- c. Persediaan,
- d. Sewa

- e. Instrument keuangan dan investasi jangka Panjang,
- f. Dan aset lainnya yang berupa tanah, gedung, peralatan yang menunjang kegiatan entitas.

2. Liabilitas

Liabilitas atau hutang merupakan kewajiban entitas kepada pihak lain yang belum diselesaikan, hutang merupakan sumber dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan entitas dan diperoleh dari kreditur.

Penyajian liabilitas terdiri dari:

- a. Hutang,
- b. Pendapatan diterima dimuka,
- c. Hutang lainnya,
- d. Dan hutang jangka Panjang.

3. Aset neto

Aset neto pada umumnya merupakan modal yang didapat dari aset dikurangi liabilitas. Tetapi, dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba aset neto terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Aset neto tanpa pembatasan

Merupakan aset yang tidak mempunyai pembatasan atas penggunaan aset tersebut. Contohnya, dana yang didapat dari donatur tanpa memberikan keterangan apapun, dana tersebut dapat digunakan entitas untuk memenuhi segala kebutuhannya.

b. Aset neto dengan pembatasan

Merupakan aset yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya. contohnya, pemberian tanah / bangunan dengan tujuan tertentu seperti kas anak yatim dan kas fakir miskin. Lebih sederhananya, donatur memberikan sumber daya dengan syarat-syarat tertentu.

2.6.2 Laporan penghasilan komprehensif

Laporan ini digunakan untuk menunjukkan surplus atau defisit dan komprehensif lain suatu entitas. Merupakan laporan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian entitas selama periode tertentu, didalamnya juga terdapat penghasilan dan beban entitas dalam satu periode. Laporan penghasilan komprehensif atau laba rugi menyajikan informasi mengenai:

1. Pendapatan,
2. Beban,
3. Laba / rugi neto

2.6.3 Laporan perubahan aset neto

Merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya (donatur) dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Didalamnya juga terdapat informasi mengenai pembebasan aset dari pemberi sumber daya dengan batasan jika ada.

2.6.4 Laporan arus kas

Didalamnya memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran suatu entitas dalam satu periode tertentu. Menurut SAK ETAP, didalam laporan arus kas terdapat beberapa informasi mengenai:

a. **Aktivitas operasi**

Aktivitas ini didapatkan dari aktivitas utama penghasilan entitas. Berupa transaksi, kegiatan, dan kondisi lainnya yang dapat memengaruhi laba dan rugi.

b. **Aktivitas investasi**

Aktivitas ini diperoleh dari pengeluaran kas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dimasa yang akan datang.

c. **Aktivitas pendanaan**

Merupakan aktivitas yang dapat memengaruhi perubahan komposisi aset dan liabilitas, contoh aktivitas pendanaan yaitu pelunasan pinjaman dan penerimaan kas dari pinjaman, arus kas pendanaan dapat bernilai surplus dan defisit.

2.6.5 Catatan atas laporan keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan, pendukung, maupun penunjang atas laporan keuangan pokok yang akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk membacanya.

2.7 Yayasan

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, “yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan”. Yayasan bertujuan melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan. Setiap yayasan harus memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh yayasan. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah

kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang dan bisa juga berasal dari sumbangan atau bantuan. Pola pertanggungjawaban yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas sebagai salah satu elemen penting dalam proses akuntabilitas publik.

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, “Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina yang merupakan organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas; Pengurus yang merupakan organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan dan mampu melakukan perbuatan hukum, yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara; dan Pengawas yang merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam melakukan kegiatan yayasan”.

Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas, misalnya membuat keputusan tentang anggaran dasar, mengangkat dan menghentikan pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan, dan membuat keputusan tentang penggabungan atau pembubaran yayasan. Yayasan minimal memiliki 1 (satu) pengawas.

Berikut adalah kepentingan bersama para pemakai laporan keuangan:

- a. Jasa yang diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
- b. Cara pengelola melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja yayasan.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan yang disusun oleh yayasan adalah agar dapat tersajinya beberapa informasi berikut:

- a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih suatu yayasan.
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai serta sifat aktiva bersih.
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya selama 1 (satu) periode dan hubungan diantara keduanya.
- d. Cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya.
- e. Usaha jasa suatu yayasan.